

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan data dari yang dihimpun *World Health Organization* (WHO) diperkirakan bahwa setiap tahun ada 3.000 hingga 5.000 anak yang lahir dengan kondisi *Down Syndrome*. Angka ini menunjukkan bahwa jumlah individu dengan kebutuhan khusus masih sangat tinggi, maka dari itu penting untuk memastikan bahwa sistem pendidikan mampu memberikan layanan yang sesuai dan mendukung perkembangan mereka (United Nations, 2020)

Kondisi pendidikan anak berkebutuhan khusus di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai kendala. Banyak sekolah yang belum memadai, baik segi fasilitas ataupun sumber daya manusia untuk mengakomodasi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Dalam beberapa kasus, terdapat keterbatasan kendali dan pemahaman dari pihak sekolah dan masyarakat tentang pentingnya pendidikan inklusif. Akibatnya, sejumlah anak berkebutuhan khusus seringkali diabaikan atau bahkan terisolasi secara sistematis dari lingkungan pendidikan yang seharusnya mendukung perkembangan mereka.

UUD RI Tahun 1945 secara jelas dan tegas menjamin bahwa setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan, yang dipertegas dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maupun dalam Peraturan Mendiknas No. 70 tahun 2009 tentang Tentang Pendidikan Inklusi Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa. Disamping itu juga adanya jaminan dari berbagai instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi Indonesia, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948), Deklarasi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua (1990), Peraturan Standar PBB tentang Persamaan Kesempatan bagi Para Penyandang Cacat (1993), Pernyataan Salamanca dan Kerangka Aksi UNESCO (1994), Undangundang Penyandang Kecacatan (1997), Kerangka Aksi Dakar (2000) dan Deklarasi Kongres Anak Internasional

(2004). Semua instrumen hukum tersebut ingin memastikan bahwa semua anak, tanpa kecuali, memperoleh pendidikan. (Sunardi, 2011)

Bentuk diskriminasi terhadap anak-anak berkebutuhan khusus di bidang pendidikan tidak hanya dipengaruhi oleh aspek fasilitas dan sumber daya manusia yang kurang. Melainkan diskriminasi juga dapat termanifestasi dalam bentuk perlakuan tidak adil dan ketidaksetaraan dalam aksesibilitas pendidikan. Salah satu bentuk diskriminasi yang umum terjadi adalah segregasi, di mana anak-anak berkebutuhan khusus sering dipisahkan dan ditempatkan dalam kelas atau lembaga pendidikan terpisah dari siswa lainnya.

Stereotip negatif juga menjadi permasalahan serius dalam pendidikan inklusi. Masyarakat hingga pihak sekolah seringkali belum sepenuhnya memahami potensi dan kemampuan anak-anak berkebutuhan khusus. Stereotip ini dapat mempengaruhi persepsi guru, teman sekolah, dan bahkan orang tua terhadap kemampuan belajar anak-anak tersebut. Akibatnya, anak-anak berkebutuhan khusus terhambat dalam mendapatkan dukungan dan kesempatan belajar yang setara.

Untuk dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang ramah bagi ABK, sekolah inklusi memerlukan Kerjasama antara guru pendamping dan guru kelas (Wardah, 2019). Dalam melaksanakan pembelajaran antara guru pendamping dan guru kelas perlu bekerjasama dalam menangani perilaku ABK dengan maksimal dan tidak terlalu memaksakan kemampuannya.

Penggunaan metode atau strategi belajar yang bervariasi dalam Pendidikan inklusi dituntut untuk mampu menciptakan situasi pembelajaran yang aktif dan fleksibel (Darma, 2015).

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menetapkan standar nasional untuk penyelenggaraan pendidikan, termasuk pendidikan inklusif. Standar ini mencakup kurikulum, pendidik, dan tenaga kependidikan yang kompeten dalam menangani anak dengan kebutuhan khusus.

Guru atau tenaga pendidik yang kompeten sangat mempengaruhi penyelenggaraan pendidikan inklusi. Guru perlu memiliki kemampuan dalam

mengelola kelas serta memiliki kompetensi mengelola pembelajaran dan pemahaman peserta didik yang beragam. Dalam menyampaikan pesan perlu menggunakan nada yang baik, khususnya dalam memberikan motivasi, penghargaan, dan membangun rasa percaya diri siswa (Tamela, 2020).

Meskipun sudah ada sejumlah sekolah yang melaksanakan pendidikan inklusi di Indonesia, data pokok pendidikan (Dapodik) per Desember 2022 menunjukkan bahwa baru sekitar 40.928 sekolah yang telah menerapkan pendidikan inklusi di berbagai jenjang pendidikan. Dari jumlah tersebut, 135.946 peserta didik berkebutuhan khusus telah mendapatkan pembelajaran di lingkungan inklusif (Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, 2023; Pengelola Web Kemendikbud, 2023). Meskipun langkah ini terlihat positif, masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan cakupan dan kualitas pendidikan inklusif di seluruh Indonesia.

Maka dari itu, diperlukan manajemen pendidikan yang baik dalam mengatasi tantangan tersebut. Manajemen yang efektif dapat memberikan arah, dukungan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa anak-anak yang berkebutuhan khusus mendapatkan pendidikan yang setara dan berkualitas. Manajemen pendidikan inklusi menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang mendukung, memahami, dan memberdayakan anak-anak berkebutuhan khusus.

Armi (2019) menyatakan bahwa manajemen pendidikan inklusi dipengaruhi oleh faktor internal sekolah (kepemimpinan, kompetensi guru, dan sumber daya), faktor eksternal (dukungan, komunitas, kebijakan pemerintah), dan faktor sosial budaya (persepsi masyarakat, nilai-nilai inklusi).

Berdasarkan teori Social Constructivism, membahas bahwa perkembangan manusia dapat dilihat sebagai hasil dari interaksi sosial antara guru, siswa, dan lingkungan belajar (McKinley, 2015). Teori ini menekankan pentingnya interaksi sosial dalam membentuk pemahaman bersama dan menciptakan lingkungan belajar inklusif. Hal tersebut tentunya berguna dalam memahami bagaimana interaksi yang dilakukan oleh anak-anak berkebutuhan

khusus agar sekolah dapat memahami bagaimana caranya membentuk manajemen pendidikan yang tepat dan inklusif.

Terdapat juga teori Resource Dependence. Teori ini membahas ketergantungan pada sumber daya eksternal, seperti dukungan pemerintah, lembaga, dan masyarakat, dapat memengaruhi kemampuan suatu institusi dalam menjalankan perannya (Yuniar, 2022). Teori ini dapat membantu menjelaskan bagaimana hubungan antara sekolah dan hal eksternal seperti sumber daya memainkan peran kunci dalam menentukan keberhasilan implementasi pendidikan yang inklusif terhadap anak-anak berkebutuhan khusus.

Kurangnya pelatihan dan pemahaman dari pihak guru juga merupakan salah satu aspek yang perlu diperhatikan. Guru yang tidak memahami kebutuhan khusus setiap siswanya cenderung kesulitan memberikan dukungan pendidikan yang efektif, baik dari segi pengajaran maupun pengelolaan lingkungan belajar. Hal ini tentunya dapat memunculkan ketidaksetaraan bagi anak berkebutuhan khusus, serta mengurangi motivasi dan minat mereka terhadap proses belajar.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Umu Sayidah tentang “Pengaruh Kompetensi Guru Terhadap Hasil Belajar Siswa ABK di SMA Negeri Rambipuji “. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi guru memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar siswa ABK di SMA Negeri Rambipuji. Hasil Uji F menunjukkan $F_{hitung} = 194,392 > F_{tabel} = 4,043$ dengan tingkat signifikansi $0,000 < \alpha = 0,05$ dengan persamaan regresi sederhana $\hat{Y} = 28,333 + 0,674X$. Hasil perhitungan koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,802, hal ini menunjukkan bahwa besarnya persentase pengaruh kompetensi guru terhadap hasil belajar siswa ABK di SMA Negeri Rambipuji sebesar 80,2%, sedangkan sisanya yakni 19,8% dipengaruhi oleh variabel bebas lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. (Umu, 2018)

Dari hasil penelitian terdahulu, kebaruan dari penelitian ini yaitu pada responden, sampel yang digunakan yaitu tenaga pendidik. Selain itu, variabel bebas penelitian saat ini lebih memfokuskan pada aspek Manajemen Pendidikan

Inklusi dan untuk variabel terikatnya fokus pada Kompetensi Guru yang tentu akan berbeda hasil penelitiannya. Oleh karena itu, peneliti sangat tertarik untuk mengambil penelitian di Madrasah Ibtidaiyah Swasta se- kecamatan Cibiru.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti pada Madrasah Ibtidaiyah Swasta se- kecamatan Cibiru ditemukan beberapa permasalahan di dalam aspek pengelolaan Pendidikan Inklusi yang belum teratur seperti keterbatasan fasilitas, pemahaman yang kurang, dan diskriminasi. Akibatnya anak-anak dengan kebutuhan khusus seringkali mengalami kesulitan dalam mendapatkan dukungan yang memadai untuk perkembangan dan pembelajaran mereka di lingkungan Pendidikan. Hal tersebut tentu saja menjadi suatu permasalahan yang harus dicari solusinya, mengingat Madrasah Ibtidaiyah Swasta se- kecamatan Cibiru sudah menerapkan berbagai cara dalam pengelolaan Pendidikan Inklusi.

Penelitian ini mempunyai urgensi bahwa manajemen pendidikan inklusi dapat memengaruhi kompetensi guru. Manajemen Pendidikan inklusi yang efektif sebagai solusi untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Manajemen pendidikan inklusi ini mencakup perencanaan, implementasi, dan evaluasi kebijakan serta proses pendidikan yang dapat memastikan hak setiap anak terpenuhi, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. (Mitchel, 2014)

Penelitian ini dilaksanakan di dua Madrasah Ibtidaiyah Swasta se- Kecamatan Cibiru. Berdasarkan observasi awal yang dilaksanakan oleh peneliti di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Matla'ul Atfal Kecamatan Cibiru, diperoleh informasi mengenai Manajemen Pendidikan Inklusi di sekolah tersebut. Terdapat 17 Staf guru di sekolah tersebut dengan masing-masing personil memiliki tanggung jawab dan tugasnya masing-masing. Manajemen Pendidikan Inklusi di sekolah Madrasah Ibtidaiyah se- Kecamatan Cibiru cukup baik, namun penulis menemukan permasalahan yaitu masih ada beberapa guru atau tenaga pendidik yang belum memiliki kemampuan dalam mengelola kelas serta memiliki kompetensi mengelola pembelajaran dan pemahaman peserta didik yang beragam, sehingga hal tersebut akan berdampak terhadap tanggung jawab guru dalam menyelesaikan pekerjaannya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Manajemen Pendidikan Inklusi Terhadap Kompetensi Guru “(Penelitian di Madrasah Ibtidaiyah Swasta se-kecamatan Cibiru).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Manajemen Pendidikan Inklusi di Madrasah Ibtidaiyah Swasta se-Kecamatan Cibiru?
2. Bagaimana Kompetensi Guru di Madrasah Ibtidaiyah Swasta se-Kecamatan Cibiru?
3. Bagaimana Pengaruh Manajemen Pendidikan Inklusi Terhadap Kompetensi Guru di Madrasah Ibtidaiyah Swasta se-Kecamatan Cibiru?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi Manajemen Pendidikan Inklusi di Madrasah Ibtidaiyah Swasta se-Kecamatan Cibiru.
2. Untuk mengidentifikasi Kompetensi Guru di Madrasah Ibtidaiyah Swasta se-Kecamatan Cibiru.
3. Untuk menganalisis Pengaruh Manajemen Pendidikan Inklusi Terhadap Kompetensi Guru di Madrasah Ibtidaiyah Swasta se-Kecamatan Cibiru.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Adapun manfaat secara teoretis penelitian ini adalah:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori terkait manajemen pendidikan inklusi. Hasil penelitian dapat membantu memperkaya dan memperluas temuan tentang konsep-konsep manajemen yang spesifik dalam hal pendidikan inklusi.

Penelitian ini memiliki potensi untuk menghasilkan model atau kerangka konseptual yang dapat menjadi dasar bagi penelitian lanjutan di bidang manajemen pendidikan inklusi. Hal ini tentunya dapat menjadi sumbangan yang berarti dalam memahami kompleksitas hubungan antara manajemen pendidikan inklusi terhadap kompetensi guru.

2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis penelitian ini adalah:

Hasil penelitian ini tentunya dapat memberikan informasi yang berharga bagi pihak sekolah dalam pengembangan strategi dan kebijakan manajemen pendidikan inklusi. Hal ini dapat membantu sekolah dalam memaksimalkan sumber daya dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus.

Penelitian ini dapat memberikan masukan yang berguna dalam meningkatkan kompetensi guru. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menyusun program pelatihan dan pengembangan profesional bagi guru, sehingga mereka dapat lebih efektif dalam mendukung perkembangan anak berkebutuhan khusus di lingkungan yang inklusi

E. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini meliputi satu variabel bebas yaitu Manajemen Pendidikan Inklusi dan satu variabel terikat yaitu Kompetensi Guru. Untuk mengantisipasi terlalu luasnya ruang lingkup permasalahan penelitian ini, maka peneliti perlu membatasi permasalahan penelitiannya, yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian ini tidak menggunakan variabel lain selain variabel pengaruh manajemen Pendidikan inklusi terhadap Kompetensi Guru.
2. Pengaruh manajemen Pendidikan inklusi terhadap kompetensi guru diukur dengan kuisisioner atau angket.
3. Objek penelitian dilakukan hanya pada tenaga pendidik di Madrasah Ibtidaiyah Swasta se-Kecamatan Cibiru.

F. Kerangka Berpikir

Kurangnya guru yang kompeten merupakan permasalahan yang seringkali dihadapi oleh sekolah-sekolah inklusi. Salah satu faktor yang menyebabkan hal tersebut adalah sekolah tidak memberikan pelatihan kepada guru mengenai cara menangani perilaku siswa berkebutuhan khusus. Padahal dalam melaksanakan sekolah inklusi guru perlu memiliki kemampuan dalam mengelola kelas serta

memiliki kompetensi mengelola pembelajaran dan pemahaman peserta didik yang beragam.

Secara etimologis istilah manajemen berasal dari bahasa latin manus yang berarti "tangan", dalam bahasa italia maneggiare berarti "mengendalikan, dalam bahasa inggris istilah manajemen berasal dari kata to manage yang berarti mengatur. Menurut George R. Terry mendefinisikan, manajemen sebagai "proses yang jelas terdiri dari tindakan- tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian yang dilaksanakan untuk menentukan serta melaksanakan sasaran/ tujuan yang telah ditentukan dengan menggunakan sumber daya dan sumber-sumber lainnya" (Terry G. R., 1989). Sedangkan Pidarta mengemukakan, "fungsi manajemen sekolah secara sederhana yaitu: merencanakan, mengorganisasi, menyusun staf, mengarahkan, mengoordinasi dan mengontrol, dan menyusun anggaran belanja". Oleh karena itu, ke-5 fungsi tersebut harus terlaksana secara efektif dan efisien, agar output dari manajemen sekolah sesuai dengan apa yang telah dirumuskan sebelumnya (Pidarta, 1990).

Skjorten (2003) menyatakan pendidikan inklusif adalah konsep pendidikan yang merangkul semua anak tanpa kecuali, Inklusi berasumsi bahwa hidup dan belajar bersama adalah suatu cara yang lebih baik, yang dapat memberikan keuntungan bagi setiap orang, bukan hanya anak-anak yang diberi label sebagai yang memiliki suatu perbedaan. Pendidikan inklusi adalah model pendidikan yang mengintegrasikan pesertadidik reguler dan peserta didik berkebutuhan khusus dalam program pembelajaran yang sama di sekolah reguler (Odom, 1998)

Salamanca (1994) dan Aldjon (2021) mengemukakan Indikator Manajemen Pendidikan Inklusif yaitu:

1. Hak Dasar

Setiap anak memiliki hak dasar atas pendidikan, dan harus diberi kesempatan untuk mencapai dan mempertahankan tingkat yang dapat diterima pembelajaran.

2. Karakteristik

Setiap anak memiliki karakteristik yang unik, minat, kemampuan, dan kebutuhan pembelajaran.

3. Sistem Pendidikan

Sistem pendidikan harus dirancang dan program pendidikan dilaksanakan dengan memperhatikan keanekaragaman karakteristik dan kebutuhan tersebut.

4. Aksesabilitas Fasilitas

Mereka yang memiliki kebutuhan pendidikan khusus harus memiliki akses ke sekolah reguler, yang seharusnya mengakomodasi mereka dalam rangka pedagogi yang berpusat pada anak mampu memenuhi kebutuhan tersebut.

5. Sekolah Reguler

Sekolah reguler dengan orientasi inklusif ini merupakan cara yang paling efektif untuk memerangi sikap diskriminasi, menciptakan masyarakat yang ramah, membangun masyarakat yang inklusif dan mencapai pendidikan untuk semua.

Kompetensi berasal dari kata *competency* (Bahasa Inggris) yang memiliki arti *ability* (kemampuan), *capability* (kesanggupan), *proficiency* (keahlian), *qualification* (kecakapan), *eligibility* (memenuhi persyaratan), *readiness* (kesiapan), *skill* (Kemahiran), dan *adequency* (kepadanan) (Marshall, 1994). Menurut Anggraeni Kompetensi merupakan suatu atribut untuk melekatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan unggul. (Anggraeni, 2017)

Djamarah (2000) menyatakan guru adalah orang yang bertanggungjawab mencerdaskan kehidupan anak didik. Guru dengan penuh dedikasi dan loyalitas berusaha membimbing dan membina anak didik agar di masa mendatang menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Sedangkan menurut Yusuf, guru adalah seorang yang mampu melaksanakan tindakan pendidikan dalam suatu situasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan

atau seorang dewasa jujur, sehat jasmani dan rohani, susila, ahli, terampil, terbuka adil dan kasih sayang. (Yusuf, 2000).

Alkornia (2016) menyatakan kompetensi guru merupakan kemampuan dan kewenangan guru dalam menjalankan kewajiban-kewajibannya dengan tanggung jawab dengan tugasnya menjadi guru. Karena guru merupakan suatu profesi atau pekerjaan, maka kompetensi sangat dibutuhkan dalam proses belajar mengajar.

Spencer (1993) dan Ramayulis (2013) mengemukakan tentang kompetensi seorang guru yaitu:

1. Kompetensi Kepribadian

Kompetensi ini merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, menjadi teladan bagi siswa

2. Kompetensi Pedagogik

Kompetensi ini yang harus dikuasai guru meliputi pemahaman guru terhadap siswa, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan pengembangan siswa untuk mengaktualisasikan sebagai potensi yang dimilikinya

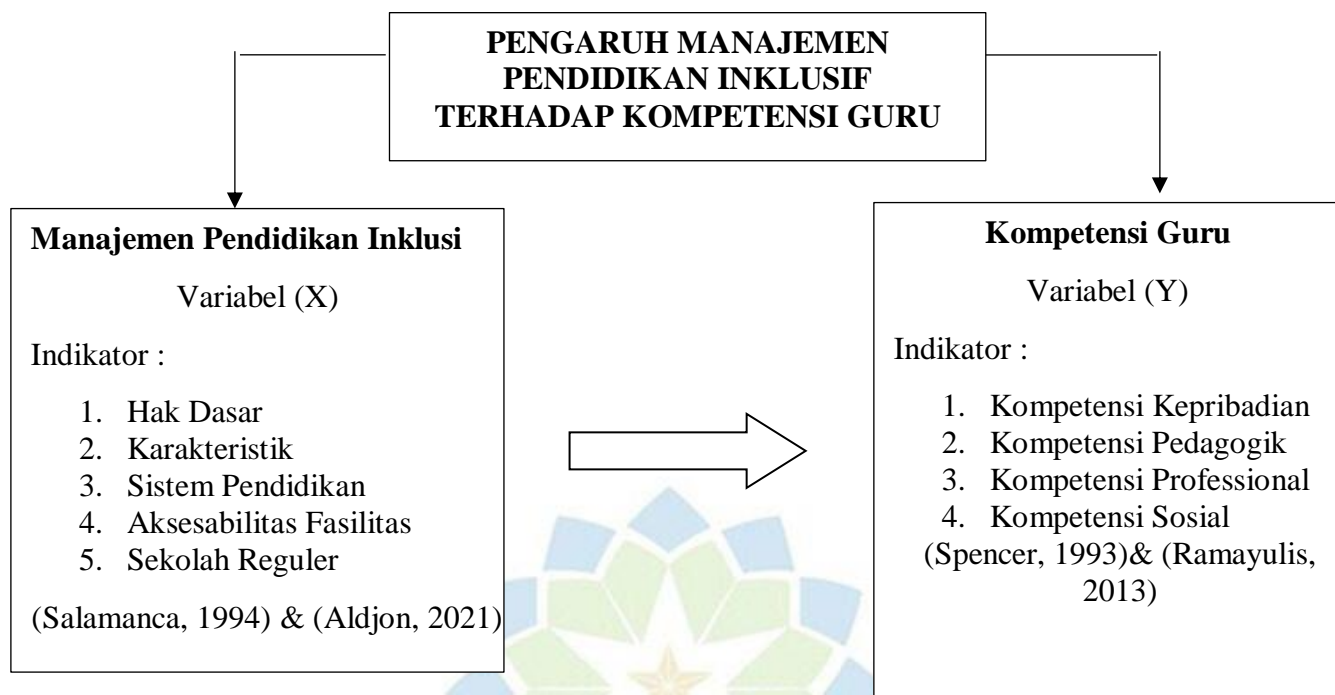
3. Kompetensi Professional

Kompetensi profesional merupakan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang harus dikuasai guru mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materi serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuan

4. Kompetensi sosial

Kompetensi sosial merupakan kemampuan yang harus dimiliki guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan siswa, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali siswa dan masyarakat sekitar.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kerangka acuan pada penelitian ini sebagai berikut.



Gambar 1 Kerangka Berfikir

G. Hipotesis Penelitian

Dantes (2012) menjelaskan bahwa Hipotesis merupakan praduga atau asumsi yang harus diuji melalui data atau fakta yang diperoleh dengan melalui penelitian. Dari pembahasan tersebut terdapat dua hipotesis yang diajukan, yaitu:

1. Hipotesis Alternatif (H_a)

H_a : Terdapat pengaruh antara Manajemen Pendidikan Inklusi terhadap Kompetensi Guru di Madrasah Ibtidaiyah Swasta se- Kecamatan Cibiru.

2. Hipotesis Nol (H_o)

H_o : Tidak terdapat pengaruh antara Manajemen Pendidikan Inklusi terhadap Kompetensi Guru di Madrasah Ibtidaiyah Swasta se- Kecamatan Cibiru.

H. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, dan telah diuji sebelumnya berdasarkan metode penelitian yang digunakan (Sugiyono, 2018). Penelitian tersebut dapat dijadikan referensi

sebagai bahan perbandingan antara peneliti yang sekarang dengan peneliti sebelumnya. Dalam penelitian ini dengan judul “Pengaruh Manajemen Pendidikan Inklusif terhadap Kompetensi Guru di Madrasah Ibtidaiyah Swasta se-kecamatan Cibiru” Dalam hal ini penulis menggunakan sepuluh judul penelitian sebagai bahan perbandingan atau acuan untuk penelitian yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1.	Rofikah (2022) Manajemen Pendidikan Inklusif (Studi Kasus Di Mts Al-Hidayah Purwokerto)	Menaganalisis Manajemen Pendidikan Inklusif	Subjek penelitian yaitu, Kepala Madrasah, koordinator inklusi, dan guru pendamping khusus. Sedangkan Subjek Penelitian saat ini hanya guru saja. Penelitian dengan metode kualitatif. Sedangkan penelitian saat ini menggunakan metode kuantitatif.	Manajemen pendidikan inklusi dari perencanaan menggunakan program asesmen, kemudian pada tahap pengorganisasian kepala madrasah memberikan wewenang kepada koordinator inklusi untuk membantunya melaksanakan tugasnya
2.	Mukti (2020) Manajemen Pendidikan Karakter Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Pada Kelas Inklusi Di Sd Terpadu Putra Harapan Purwokerto	Menganalisis Pendidikan Inklusi yang ada di sekolah.	Penelitian dengan metode deskriptif kualitatif. Sedangkan penelitian saat ini menggunakan metode kuantitatif.	Keberhasilan pendidikan karakter bagi siswa ABK di kelas inklusi memerlukan adanya dukungan dari semua SDM yang terlibat yakni dari pihak sekolah, orangtua, keluarga dan lingkungan masyarakat.
3.	Marlia (2018) Manajemen Pendidikan Inklusi Di Sekolah Dasar Islam Terpadu Annida Sokaraja Banyumas	Menaganalisis Manajemen Pendidikan Inklusif	Penelitian dengan metode kualitatif. Sedangkan penelitian saat ini menggunakan metode kuantitatif. Subjek Penelitian yaitu, Kepala Sekolah, Waka Kurikulum dan Koordinator Inklusi. Sedangkan subjek penelitian saat ini hanya guru saja.	Manajemen Sekolah Dasar Islam Terpadu Annida Sokaraja Banyumas dikatakan sudah cukup baik antara lain karena dari perencanaan yang matang dibuktikan dengan adanya rencana program IEP (Individual Education Plan) dimana hal tersebut akan memberikan

No.	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
				pelayanan yang sesuai dengan kriteria anak berkebutuhan khusus.
4.	Palupi (2019) Manajemen Pendidikan Inklusi di SD Negeri Secang 3 Kabupaten Magelang	Menganalisis Manajemen Pendidikan Inklusi	Penelitian dengan metode kualitatif. Sedangkan penelitian saat ini menggunakan metode kuantitatif. Penelitian saat ini tidak hanya berfokus kepada Manajemen Pendidikan Inklusif saja namun bagaimana pengaruh Manajemen Pendidikan Inklusif terhadap Kompetensi Guru.	Manajemen pendidikan inklusi di SD Negeri Secang 3 memuat 8 ruang lingkup seperti; manajemen kurikulum dan pembelajaran, manajemen peserta didik, manajemen pendidik dan tenaga kependidikan, manajemen hubungan masyarakat, manajemen sarana dan prasarana, manajemen pembiayaan, manajemen budaya dan lingkungan sekolah, serta manajemen layanan khusus.
5.	Ileva (2021) Manajemen Pendidikan Inklusi Pada Tingkat Pendidikan (Studi Kasus pada SD Negeri 5 Arcawinangun Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas).	Menganalisis Manajemen Pendidikan Inklusif.	Penelitian dengan metode pendekatan kualitatif. Sedangkan penelitian saat ini menggunakan metode kuantitatif	SDN 5 Arcawinangun adalah sekolah yang melaksanakan pendidikan inklusi dan dijadikan sekolah percontohan sejak tahun 2011. Dalam pelaksanaannya apabila dikaitkan dengan perspektif MBS telah cukup baik serta patuh dengan peraturan yang berlaku terkait pelaksanaan manajemen pendidikan inklusi
6.	Inda Yasmita (2022) Manajemen Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi Untuk Siswa Berkebutuhan Khusus Di Sds Cendana Duri	Menganalisis Manajemen Pendidikan Inklusif	Penelitian dengan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Sedangkan penelitian saat ini menggunakan metode kuantitatif	Perencanaan pendidikan inklusi meliputi kurikulum dan pengajaran yang berkualitas, pengorganisasian dilakukan dengan menunjuk koordinator pendidikan inklusi
7.	Wati (2014) Manajemen Pendidikan Inklusif Di Sekolah Dasar	Menganalisis Manajemen Pendidikan Inklusif	Penelitian dengan metode deskriptif kualitatif. Sedangkan penelitian saat ini menggunakan metode	Program kepala sekolah dalam melaksanakan pendidikan inklusi

No.	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
	Negeri 32 Kota Banda Aceh		kuantitatif. Subjek Penelitian yaitu, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, wali kelas, guru pendamping khusus dan orang tua murid.. Sedangkan subjek penelitian saat ini hanya guru saja.	diimplementasikan dalam pemberian pelatihan kepada guru-guru, penerimaan peserta didik ABK, memodifikasikan kurikulum serta mengupayakan sarana dan prasarana sekolah sesuai dengan kebutuhan peserta didik.
8.	Suci (2021) Penerapan Layanan Pendidikan Inklusif Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Di Taman Kana- Kanak	Menganalisis Pendidikan Inklusif	Penelitian dengan metode kualitatif. Sedangkan penelitian saat ini menggunakan metode kuantitatif.	Guru memahami konsep dasar Pendidikan inklusif. Hal ini ditandai dengan kemampuan guru dalam menyampaikan pengertian, berbagai manfaat, dan prinsip pembelajaran sesuai dengan persepsi dan pengalamannya.
9.	Pratama (2019) Studi Evaluatif Terhadap Program Resource Center Dalam Memberikan Dukungan Layanan Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Di Sekolah Dasar Penyelenggara Pendidikan Inklusif	Menganalisis Pendidikan Inklusif	Penelitian dengan metode kualitatif. Sedangkan penelitian saat ini menggunakan metode kuantitatif.	Pengarahan pada kategori baik karena beberapa kriteria standar pelayanan minimal pendidikan inklusi tidak terpenuhi seperti program pembelajaran individual
10.	Kholit (2018) Implementasi Pendidikan Inklusif Pada Jenjang Sekolah Dasar Di Kota Batu	Menganalisis Pendidikan Inklusif	Penelitian dengan metode kualitatif. Sedangkan penelitian saat ini menggunakan metode kuantitatif.	Pendidikan inklusif pada jenjang sekolah dasar di Kota Batu masih banyak harus diperbaiki dari aspek sumber daya, sumber daya manusia, dan sarana prasarana

Secara umum, sepuluh penelitian terdahulu memiliki beberapa persamaan utama, yaitu sebagian besar menyoroti pentingnya peran manajemen dalam meningkatkan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran inklusif, khususnya dalam hal pendekatan pedagogik, pemahaman terhadap kebutuhan siswa

berkebutuhan khusus, dan penggunaan strategi yang adaptif. Selain itu, mayoritas penelitian menyepakati bahwa pelatihan dan dukungan manajemen secara berkelanjutan berkontribusi signifikan terhadap pengembangan profesional guru. Namun, perbedaannya terletak pada fokus kajian dan metodologi yang digunakan.

